



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA
Jln. Imam Bonjol Saranglang Desa. Airpaoh, Kab. OKU,
e-maill : rutanbaturaja@gmail.com

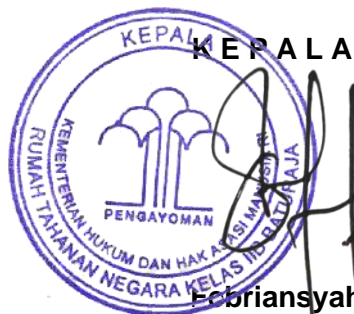
13 Juni 2023

Nomor : W6.PAS.PAS.13-UM.01.01 -0026
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun
2023 Pada Rumah Tahanan Klas IIB Baturaja

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Cq. Kepala Divisi Administrasi
di-
Palembang

Sehubungan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan nomor : W.6.PR.03-0125 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun 2023. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun 2023 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja (Laporan Terlampir).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Febriansyah
NIP. 19820213 200012 1 004



LAPORAN KINERJA

RUTAN BATURAJA
TAHUN 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAM HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

“Segala puji syukur hehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rutan Kelas IIB Baturaja dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023”

“Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesainya laporan kinerja ini dan tercapainya laporan kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja. Semoga LKJIP Rutan Kelas IIB Baturaja dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI dan berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).”

Kepala Rutan Baturaja

Febriansyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

“Penyusunan LKJIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

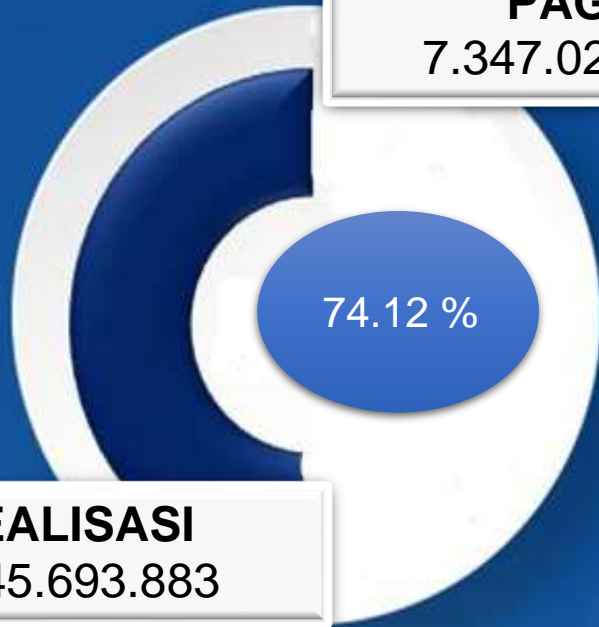
Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja(PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, mudah-mudahan LKJIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja dimasa yang akan datang.”





KINERJA KEUANGAN

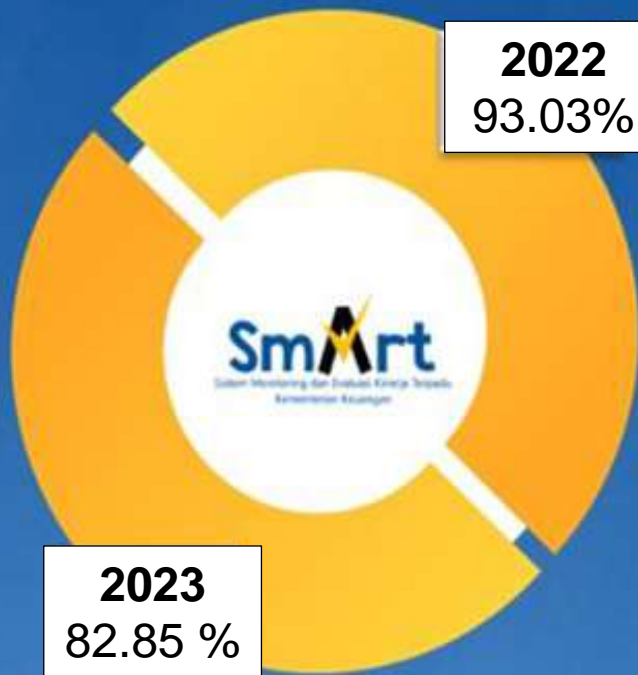


PAGU
7.347.024.000

REALISASI
5.445.693.883



PENILAIAN SMART

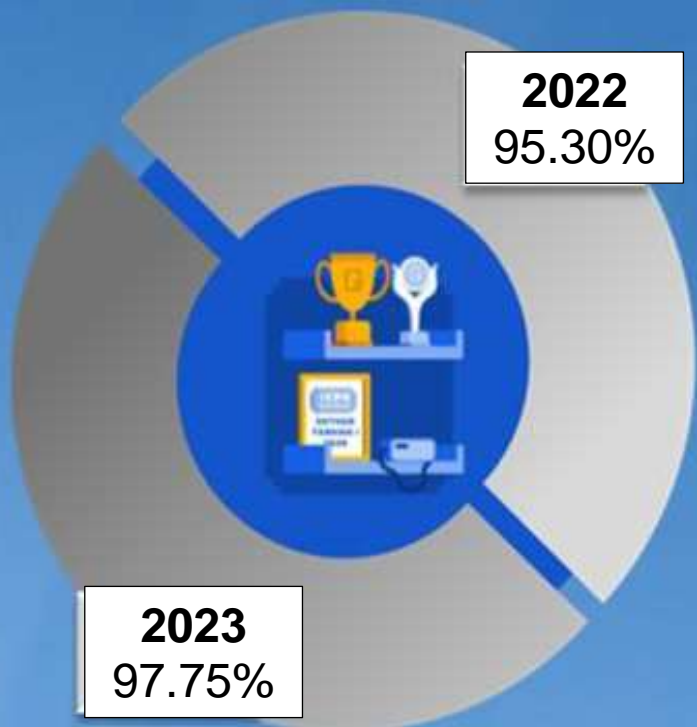


2022
93.03%

2023
82.85 %



PENILAIAN IKPA



2022
95.30%

2023
97.75%

Rutan Baturaja memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan dan tercantum dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90%	40%	50%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	40%	50%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	40%	50%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	49%	50%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	51%	52%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	40%	50%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	35%	50%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	35%	50%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	40%	50%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	40%	55%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	40%	48%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	30%	50%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Kendaraan Bermotor	1		
	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	95		
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1265		
	Jumlah Gedung/ Bangunan	28		
	Nilai IKPA	100	97.75	97.75%
	Nilai SMART	100	82.85	82.85%

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3.738.961.000	3.528.350.616	210.610.384	94.37 %
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	3.608.063.000	1.917.343.267	1.690.719.733	53.14 %
JUMLAH		7.347.024.000	5.445.693.883	1.901.330.117	74.12 %

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	2.865.787.000	1.360.292.443	(47.47%)
2	Belanja Barang	4.481.237.000	1.992.525.423	(44.46%)
3	Belanja Modal			
TOTAL		7.347.024.000	3.352.817.866	(45.64%)

Penyerapan anggaran pada Rutan Kelas IIB Baturaja cukup optimal ini menjadi faktor penentu tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Layanan Manajemen Satker yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

NILAI SMART



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA	8
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
<i>Gambar 1.1</i>	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
E. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA KEGIATAN RUTAN KELAS IIB BATURAJA	13
<i>Tabel 2.1</i>	20
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
<i>Gambar 2.1</i>	24
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
<i>Tabel 3.1</i>	27
<i>Tabel 3.2</i>	29
<i>Tabel 3.3</i>	29
<i>Tabel 3.4</i>	31
<i>Tabel 3.5</i>	32
2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	33
<i>Tabel 3.6</i>	33
<i>Tabel 3.7</i>	33
BAB IV.....	34
PENUTUP.....	34
LAMPIRAN.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. ASPEK STRATEGIS
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN



LKJIP RUTAN BATURAJA 2023

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023

LKJIP Tahun 2023 Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan Kinerja Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja, sebelum menempati lokasi yang baru, terletak disamping Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu yang merupakan bangunan lama bekas peninggalan belanda dan diperoleh sebelum tahun 1945, berdasarkan DIPA Nomor 098/XIII/3/1987 pada tahun 1987 dibangun Kantor baru di Jalan Imam Bonjol Sarangelang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dan ditempati pada tanggal 1 Desember 1989 yang kini menjadi kantor Rutan saat ini. Kantor lama alih fungsikan menjadi Kantor Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), secara teknis operasionalnya dibawah naungan Departemen Kehakiman Sumatera Selatan atau sekarang dikenal dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja mempunyai luas tanah 20.000 M², terdiri dari bangunan kantor seluas 7.500 M², halaman kantor seluas 2.500 M², dan tanah kosong dengan luas 10.000 M², beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Saranglang Telp (0735) 320754-(0735) 320755. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja terdiri dari 9 blok yaitu Blok A sampai dengan Blok I dengan jumlah kamar seluruhnya 28 kamar dan kapasitas 262 orang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka / terdakwa
- b. Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan
- c. Melakukan pengelolaan Rutan
- d. Melakukan urusan tata usaha Rutan

3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KELAS IIB BATURAJA



RUTAN KELAS IIB BATURAJA

SUBSEKSI PENGELOLAAN

Tugas :

Melaksanakan pengelolaan rutan dan melaksanakan urusan tata usaha.

Fungsi :

Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan dan melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan administrasi umum serta pengawasan dan pembinaan kepegawaian.

SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN

Tugas :

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pelayanan tahanan.

Fungsi :

Melaksanakan administrasi dan dokumen tahanan, memberikan perawatan kesehatan tahanan, memberikan bantuan hukum, penyuluhan dan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

SUBSEKSI KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

Tugas :

Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.

Fungsi :

Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melaksanakan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan dan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Rutan Kelas IIB Baturaja saat ini berjumlah 43 Orang sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kepangkatan :

- Pembina Tk I (IV/b) : -
- Pembina (IV/a) : -
- Penata Tk. I(III/d) : 3 Orang

- Penata (III/c) : 2 Orang
- Penata Muda Tk I (III/b) : 3 Orang
- Penata Muda (III/a) : 6 Orang
- Penata Muda Tk. I (II/d) : 1 Orang
- Pengatur (II/c) : 2 Orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 20 Orang
- Pengatur Muda (II/a) : 2 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

- SD/ Sederajat : -
- SLTP/ Sederajat : -
- SLTA/ Sederajat : 32 Orang
- Diploma I/ II : -
- Diploma III : 2 Orang
- Diploma IV / Strata : 7 Orang
- Strata II : 2 Orang

c. Berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-laki : 37 Orang
- Perempuan : 6 Orang

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D.ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara adalah tempat orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan pasal 1 Angka 21 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dan dalam Pasal 19 PP No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi Mahkamah Agung ditempatkan di Rumah Tahanan (RUTAN).

Secara struktural, rutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman² yang saat ini berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI. Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja yaitu :

1. Tidak adanya Mobil Ambulans untuk membawa WBP yang sakit
2. Kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan pelayanan Tahanan
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja kegiatan kehumasan
5. Tidak semua pegawai memiliki kinerja yang produktif guna menunjang kinerja satuan kerja
6. Kurangnya fasilitas kunjungan tatap muka pada satuan kerja
7. Masih banyak grade jabatan yang kosong tidak dapat digantikan oleh pegawai baru
8. Belum mendapat Predikat WBK ataupun WBBM
9. Masih ada pekerjaan yang tumpang tindih tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan

F.SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023

IKHTISAR EKEKUTIF Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran secara umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang terjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 meliputi Rencana Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja dikaitkan dengan pertanggung jawaban pencapaian sasaran kegiatan termasuk didalamnya menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil

BAB IV **PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA



LKJIP RUTAN BATURAJA 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Visi dimaksudkan adalah untuk :

- (a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi
- (b) Memberikan arah dan focus strategi yang jelas
- (c) Mampu menjadi perekat dan mampu menyatukan berbagai sasaran kegiatan yang terdapat di sebuah organisasi
- (d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
- (e) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi presiden maka ditetapkan Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja yaitu :

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap masyarakat harus mendapat hak dan kepastian hukum yang sama tanpa membedakan etnis, golongan atau ras tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan badan badan di Rupas serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari Bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian professional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian professional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Baturaja harus dilakukan Secara profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan bendasitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Rutan Kelas IIB Baturaja mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, Tahanan, Anak dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap basan/baran terlindungi

b. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders

Rutan Kelas IIB Baturaja memiliki **misi** sebagai berikut :

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia; dan
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.
4. Misi melaksanakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
6. Misi Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Sejalan dengan tujuan Kementerian Hukum dan HAM terutama pada tujuan ke-6 “Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, maka Tujuan Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara SMART dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya budaya kerja “Kami PASTI” sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Terkelolanya ASN Kemenkumham dengan baik dan professional sesuai manajemen ASN;
- 4) Penggunaan keuangan negara yang efektif
- 5) Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rutan Kelas IIB Baturaja

6) Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan

Dari beberapa tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Kegiatan, adapun sasaran kegiatan Rutan Kelas IIB Baturaja yaitu;

1. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satuan Kerja

Kebijakan dan Strategi Rutan Baturaja

Dalam mendukung misi Kementerian Hukum dan HAM, Rutan Kelas IIB Baturaja melaksanakan kebijakan strategi sebagai berikut:

a. Subseksi Pengelolaan

Urusan Kepegawaian;

1. Menyiapkan daftar hadir, baik untuk apel pagi atau apel siang dan daftar hadir rapat ataupun kegiatan lainnya
2. Menertibkan Absensi Manual dan Fingerprint;
3. Melakukan penertiban jadwal apel pagi dan apel siang bagi pegawai staff dan pejabat
4. Mengkoordinir kedisiplinan pegawai terhadap pelaksanaan tugas
5. Melaporkan secara berkala laporan-laporan, baik itu laporan kegiatan, laporan bulanan dan juga laporan tahunan.

Urusan Keuangan:

1. Menyusun Laporan Keuangan
2. Melaksanakan rekonsiliasi terhadap realisasi anggaran
3. Mengajukan belanja pegawai dan belanja barang

b. Subseksi Pelayanan Tahanan

Adapun kegiatan yang dilakukan subseksi pelayanan tahanan sbb:

1. Melakukan tertib administrasi sub seksi Pelayanan Tahanan secara umum
2. Melakukan tertib administrasi bidang registrasi
3. Menggunakan Sistem SDP online yang meliputi bidang registrasi (data napi dan tahanan) dan untuk Pelayanan Kunjungan dengan sistem pelayanan kunjungan
4. Melanjutkan program bebas peredaran uang (BPU)
5. Melaksanakan pelayanan perawatan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan
6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagiwarga binaan pemasyarakatan
7. Mengoptimalkan pemberian bimbingan kegiatan bagi Tahanan dan dan bimbingan kerja narapidana
8. Mengoptimalkan bantuan hukum dan penyuluhan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP)
9. Mengoptimalkan program percepatan PB,CB,CMB
10. Mengoptimalkan program Assimilasi Narapidana.
11. Melaksanakan program rehabilitasi bagi warga binaan Rutan Baturaja

c. Kesatuan Pengamanan Rutan

Adapun kegiatan Kesatuan Pengamanan Rutan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Unit Penjagaan :

1. Menjaga dan mengawasi barang-barang inventaris kantor setelah jam dinas kantor tutup
2. Melaksanakan pengawasan dari pos-pos penjagaan meliputi lalu lintas orang dan barang melalui pos utama/portir dan lalu lintas pembesuk
3. Mencegah dan mengatasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap penghuni blok hunian dan lingkungan Rutan Kelas IIB Baturaja
4. Menggunakan sistem SDP online dalam hal pengelolaan atau pemindahan mutasi Narapidana/Tahanan

Unit Keamanan:

1. Membantu regu jaga dalam melaksanakan pengawasan didalam blok-blokhunian serta pintu lalu lintas penghuni keluar masuk blok

2. Mencatat laporan kejadian didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja
3. Melaksanakan pengawasan terhadap besukan
4. Bersama anggota regu jaga mengadakan pengeledahan kamar-kamar penghuni secara berkala dan continue
5. Merawat dan membersihkan perlengkapan alat alat keamanan dan senjata api

Unit Administrasi Keamanan:

1. Menyelenggarakan laporan administrasi keamanan dan ketertiban (kamtib) dengan program SDP online
2. Mencatat, melengkapi strek nama-nama penghuni disetiap kamar didalam dan diluar blok penghuni
3. Melaksanakan penerimaan dan mencatat penghuni baru, penghuni yang akan sidang dengan program SDP online
4. Melaksanakan tugas pemindahan penghuni antar blok sesuai dengan ketentuan SDP online

Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rutan Kelas IIB Baturaja Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: pembinaan kedisiplinan pegawai, perubahan pola pikir pegawai dan penataan jabatan fungsional pegawai;
- b. Melaksanakan penataan kelembagaan, melalui: Penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, mengikuti penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta mengikuti reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi

		pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai 2. Penerapan manajemen resiko terhadap kegiatan dan keamanan tata tertib lingkungan Kantor
PENATAAN TATA LAKSANA	Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar sebaik-baiknya	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat terukur, sederhana transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kantor
PENATAAN SDM APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Kantor 3. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 4. Meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 5. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tingkat kematangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kantor

	implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaporkan setiap triwulan
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
	Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kemenkumham 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di lingkungan kantor 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan kantor dan mengadakan survey secara berkala

B. PERJANJIAN KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pada tahun 2023 dalam RKA Rutan Kelas IIB Baturaja, ditetapkan bahwa Rutan Kelas IIB Baturaja mengemban 4 (empat) Sasaran Kegiatan. Kegiatan tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Rutan Kelas IIB Baturaja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 RUTAN KELAS IIB BATURAJA

Gambar 2.1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriansyah, A.Md.,I.P.,S.H
Jabatan : Kepala RumahTahanan Negara Kelas IIB Baturaja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.Ilham Djaya, S.H.,M.H.,M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja

Febriansyah
NIP. 198202132000121004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pengaplikasian hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan eses penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Datadn Komunikasi	95
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1265
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	28

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.738.961.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.738.961.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.608.063.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.608.063.000

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja

Febriansyah
NIP. 198202132000121004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriansyah, A.Md.,I.P.,S.H
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Palembang, 10 Januari 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja

Febriansyah
NIP. 198202132000121004

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90% 90% 90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85% 80% 85% 80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Pencapaian 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 3 (tiga) Subseksi yang ada di lingkungan Rutan Kelas IIB Baturaja sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA



LKJIP RUTAN BATURAJA 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana kegiatan suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Baturaja atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA SASARAN KEGIATAN

Kinerja satuan kerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 diimplementasikan melalui kinerja pegawai dan pelayanan publik. Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja memastikan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, sasaran kegiatan lainnya pun dapat mendorong inovasi dan kreatifitas pegawai dalam melaksanakan tugas agar lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Secara umum Pencapaian Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 dapat dikategorikan memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	80%	70%	90%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	90%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	40%	50%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	70%	95%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	70%	80%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%		
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%		
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70%	65%	95%

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	65%	95%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	25%	20%	95%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	80%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	70%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/A nak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	80%	95%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	95.30	95.30%
	Nilai SMART	100	93.03	93.03%

SASARAN KEGIATAN 1 :**MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN***Tabel 3.2*

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	80%	70%	90%	Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan, artinya tahanan yang overstaying telah ditangani dengan sangat baik.
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	90%	telah adanya penyuluhan dari pihak Kantor Wilayah Sumatera Selatan mengenai Layanan Penyuluhan hukum
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	40%	50%	Tahanan yang memperoleh bantuan hukum setengah dari target yang ditetapkan

SASARAN KEGIATAN 2 :**MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN****NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA***Tabel 3.3*

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	70%	95%	Pemenuhan layanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yang ada di Rutan Baturaja telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, target yakni 95%

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	80%	90%	Tahanan/Narapidana/Anak telah mendapatkan layanan kesehatan secara preventif dan berkualitas, mereka dapat mengecek kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan di klinik yang ada di Rutan Baturaja, telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 90% dari target tahun 2022
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%			Belum ada tahanan atau narapidana ibu hamil dan menyusui di Rutan Baturaja sehingga target belum terpenuhi
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%			Belum ada tahanan atau narapidana yang mengalami gangguan mental di Rutan Baturaja sehingga target belum terpenuhi
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	100%	Tahanan/Narapidana lansia telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan mereka dapat mengecek kesehatan di klinik yang ada di Rutan Baturaja sebagai

				langkah preventif terkait kesehatan mereka
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70%	65%	95%	Bagi Tahanan/Narapidana/ Anak yang berkebutuhan khusus juga akan diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	65%	95%	Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif juga telah ditangani dengan baik, dengan melakukan screening secara berkala dan melakukan penyuluhan terkait penyakit menular tersebut
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	20%	95%	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban narkotika telah berubah dengan sangat baik yakni telah mencapai lebih dari 3 kali lipat dari target yang telah ditetapkan

SASARAN KEGIATAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	80%	100%	Pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai standar yang ditetapkan
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	70%	100%	Gangguan Kamtib yang dapat dicegah telah dilaksanakan dengan baik dengan cara melakukan razia rutin secara berkala
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	85%	80%	95%	Kepatuhan dan disiplin oleh Tahanan/Narapidana/Anak

Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib				sudah cukup baik karena jika mereka melakukan pelanggaran akan langsung ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%	Pemulihan Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib telah dilaksanakan dengan tuntas

SASARAN KEGIATAN 4 : MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Dokumen rencana kerja, anggaran UPT dan pelaporan yang akuntabel telah dilaksanakan dengan baik.
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%	Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan tersusun dengan baik dan telah mencapai target yang ditetapkan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%	Peningkatan kompetensi pegawai masyarakat telah terpenuhi dengan pegawai tersebut mengikuti diklat baik secara offline ataupun e-learning sehingga dapat menunjang kompetensi mereka dalam

				melaksanakan tugas
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel telah tersusun dengan baik
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Kantor juga memiliki layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Nilai IKPA	100	95.30	95.30%	Nilai yang dicapai sudah cukup baik
Nilai SMART	100	99.42	99.42%	sda

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tabel 3.6

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	3.590.351.100	3.596.337.600	135.400	100,00 %
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	3.159.518.279	3.270.219.699	34.843.301	98,95 %
JUMLAH		6.749.869.379	6.866.557.299	34.978.701	99,49 %

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

Tabel 3.7

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	2,500,287,000	2,487,782,894	(99.50%)
2	Belanja Barang	4,401,249,000	4,378,773,851	(99.49%)
3	Belanja Modal			
TOTAL		6,901,536,000	6,866,556,745	(99.49%)

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam Rangka penerapan penggaran berbasis kinerja dan memudahkan dalam melakukan ,monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri Rutan kelas IIB Baturaja menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis website kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman smart.kemenkeu.go.id.

Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART DJA



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja.

Milai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : Mei

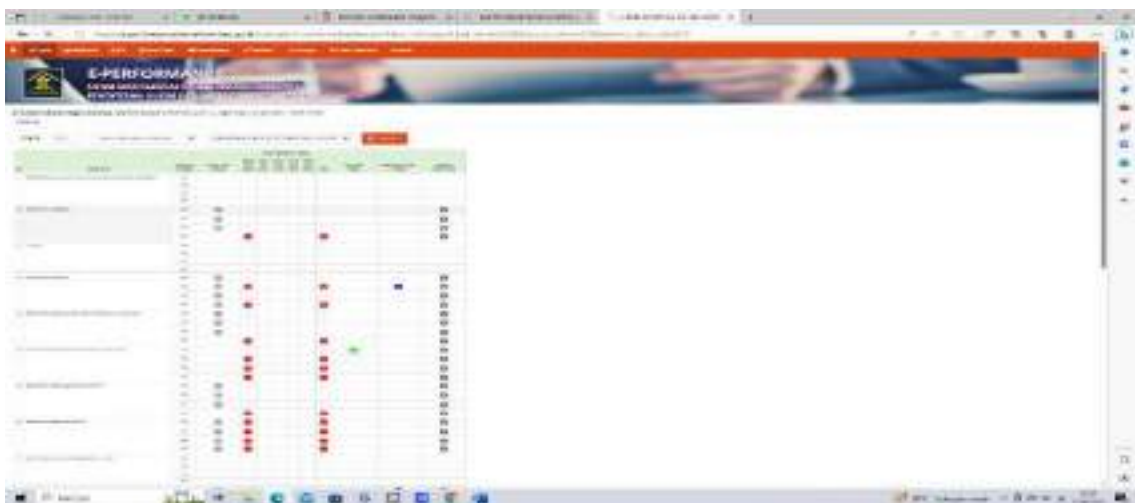
No	Kode OPPN	Kode BA	Kode Subkon	Uraian Subkon	Keterangan	Kualitas Pencapaian Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir Nilai Total (Konversi Bobot)
						Rivisi DIPA	Deviasi Saldo di DIPA	Persyaratan Anggaran	Batas Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Disposisi SPN				
1	190	01.1	408472	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	Nilai	100.00	92.32	82.08	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.75	100%	87.75
					Bobot	10	10	20	10	10	10	20				
					Nilai Akhir	12.00	9.23	16.42	18.00	10.00	10.00	20.00				
					Nilai Aspek	08.88			96.42			100.00				

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

capaian *e-performance* Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



2. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN



LKJIP RUTAN BATURAJA 2023

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2021 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Rutan Kelas IIB Baturaja dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholders* dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

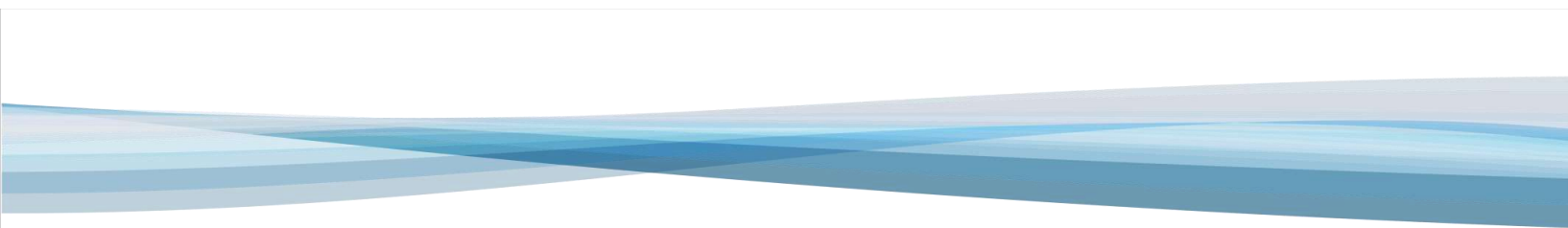
1. Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Baturaja Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Baturaja. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan Rutan Kelas IIB Baturaja
2. Pada Tahun 2022, target dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
3. Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp 6,901,536,000** terealisasi sebesar **Rp 6,866,556,745 (99.49%)**;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Rutan Kelas IIB Baturaja. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja organisasi kedepannya:

1. Memperbanyak sosialisasi/penyuluhan hukum kepada WBP agar WBP paham tentang hak-hak yang bisa mereka dapatkan;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan melakukan langkah preventif terkait penyakit yang dapat terjangkit pada WBP;

3. Meningkatkan pembinaan kerohanian WBP agar mereka dapat mendapatkan motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan mereka dimasa yang akan datang;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan kegiatan kehumasan atau teknologi yang ada di lingkungan organisasi;
5. Meningkatkan pengarahan dari Kepala Satuan Kerja agar pegawai dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugas
6. Meningkatkan langkah-langkah preventif seperti razia blok hunian agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan organisasi
7. Memberikan pembinaan terhadap pegawai agar lebih giat dalam melakukan tugas sehari-hari.



LAMPIRAN

a. Pelayanan Hukum, Administrasi dan Bimbingan Kegiatan



b. Pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan





c. Pelayanan Kesehatan dan langkah preventif mencegah penyakit





d. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriansyah, A.Md.,I.P.,S.H
Jabatan : Kepala RumahTahanan Negara Kelas IIB Baturaja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.Ilham Djaya, S.H.,M.H.,M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja


Febriansyah
NIP. 198202132000121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Datadan Komunikasi	95
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1265
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	28


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.738.961.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.738.961.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.608.063.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.608.063.000

Palembang, 10 Januari2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja


Febriansyah
NIP. 198202132000121004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriansyah, A.Md.,I.P.,S.H
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Palembang, 10 Januari 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Baturaja

Baturaja

Febriansyah

NIP. 198202132000121004